

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugeng F, Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Natin Sri, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Pratiwi Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996.
- Soekanto Soerjono, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sumardjono, S.W. Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Vredenburg, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, 1983.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama, 22 Oktober 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 10/B/2021/PTTUN-MDN perihal sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, 22 Februari 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337 K/TUN/2021 perihal perkara Tata Usaha Negara pada tingkat Kasasi, 23 September 2021.

## Karya Ilmiah

Dian Prilia, “Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) di Provinsi Sulawesi Tenggara)”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Diny Handayani, “Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi Kasus MPD KOTA PADANG)”, *Tesis*, Universitas Andalas, 2021.

Laela Dwi Cahyanni, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Nadya Paramitha, “Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah di Kabupaten Agam”, *Tesis*, Universitas Andalas, 2023.

## Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> (diakses 12 Juni 2024).